

Book Chapter AKL- revised

by Elana Era Yusdita

Submission date: 27-Jul-2022 06:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1875795281

File name: Chapter_13_revised_2.pdf (1.68M)

Word count: 1902

Character count: 12175

13

AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Elana Era Yusdita, S.E., M.S.A.

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

— **Albert Einstein**



13.1 Pendahuluan

Akuntansi keuangan sektor publik untuk instansi pemerintah memiliki pencatatan unik. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pengakuan berbasis kas digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), sedangkan pengakuan berbasis akrual digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan operasional (LO). Sekali transaksi bisa jadi akan melibatkan dua kali pencatatan, yaitu penjumlahan pada LRA dan LO. Hal ini ditentukan oleh jenis transaksinya. Jika transaksi tersebut melibatkan realisasi anggaran pada sebuah instansi, baik kas masuk maupun keluar, maka transaksi tersebut pasti akan dicatat pada LRA. Jika tidak berhubungan dengan realisasi anggaran, maka cukup dicatat pada LO saja.

Penerapan pencatatan akuntansi unik ini karena pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini secara singkat adalah proses menentukan: (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan (2) berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana nomor 1 (Mardiasmo, 2018). Perbandingan antara anggaran dan realisasi sumber daya keuangan pemerintah pusat dan daerah tertuang pada LRA. Struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011, sehingga dibutuhkan penyesuaian atau konversi pos pendapatan dan belanja sesuai PP nomor 71 tahun 2010. Ini dikarenakan dasar pencatatan dan penyusunan laporan keuangan instansi pemerintahan pusat dan daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini ada pada Lampiran PP nomor 71 tahun 2010. Peraturan-peraturan ini dapat diunduh secara gratis untuk dipelajari lebih lanjut secara mandiri.

Fokus bab ini adalah membahas akuntansi pemerintah daerah. Siklus pencatatan keuangan pada pemerintahan daerah dimulai dengan adanya bukti memorial, surat tanda setoran, setoran perintah pencairan dana langsung (SP2D-LS) dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan (Erlina *et al.*, 2020). Berikut akan dibahas cara pengakuan, perhitungan, dan pencatatan untuk transaksi yang lazim terjadi pada

instansi pemerintah, beserta laporan keuangan instansi pemerintah daerah.

13.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah

Pendapatan pada pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan secara singkat pada Tabel 13.1. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar aturan penyusunan anggaran berbeda dengan aturan pelaporan.

Tabel 13.1 Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah

No	Permendagri nomor 21 Tahun 2011	PP nomor 71 tahun 2010	Jenis Pendapatan
1	Pendapatan asli daerah	Pendapatan asli daerah	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba penyertaan pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat).
2	Dana perimbangan ^a	Pendapatan transfer ^b	^a Dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. ^b Penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Hibah dari pemerintah pusat atau daerah lain, lembaga swasta dalam negeri, kelompok maupun perorangan masyarakat, lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat dari pemerintah untuk penanganan bencana alam. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

⁶ Pendapatan-LRA diakui ketika pendapatan¹⁰ tersebut diterima di rekening umum negara atau daerah secara tunai. Pendapatan-LO diakui saat timbul hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Kedua jenis pendapatan tersebut sama-sama mengukur pendapatan berdasarkan pendapatan bruto, kecuali tidak dapat diestimasi atau dianggarkan sebelumnya. Contoh kasus dan pencatatannya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Mei 2022, Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota M menerima pajak hotel sebesar Rp.10.000.000,-.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Laporan operasional			
5 Mei 2022	Kas di kas daerah	Rp.10.000.000,-	
	Pendapatan pajak hotel-LO		Rp.10.000.000,-
Laporan realisasi anggaran			
5 Mei 2022	Estimasi Perubahan SAL	Rp.10.000.000,-	
	Pendapatan pajak hotel-LRA		Rp.10.000.000,-

Dapat kita lihat jurnal untuk LO dan LRA sebenarnya mirip. Pendapatan dibedakan dengan keterangan LO dan LRA, sedangkan akun “Kas” untuk LRA adalah “Estimasi Perubahan SAL”.

13.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah

Belanja merupakan istilah dalam LRA, sedangkan beban dipakai dalam LO. Klasifikasi ringkas pada pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan secara singkat pada Tabel 13.2. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar aturan penyusunan anggaran berbeda dengan aturan pelaporan.

Belanja-LRA diakui saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah, sedangkan beban-LO diakui saat kewajiban muncul, ada konsumsi aset, serta ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sebesar nilai wajar yang dibayarkan atau akan dibayarkan. Beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyisihan piutang, dan transfer diakui pada PPKD. Beban pegawai dan barang diakui pada SKPD.

Pada tanggal 7 Mei 2022, bendahara pengeluaran membayar pembelian 50 rim kertas F4 seharga Rp.2.812.500,-. Nilai ini termasuk PPN 11% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

Pertama, harus kita hitung unsur PPN dan PPh pasal 22 dari nominal transaksi tersebut. Jika harga sebelum pajak diberi simbol Y, maka persamaan yang dapat dibuat adalah:

$$\begin{aligned}
 2.812.500 &= Y + (11\% \times Y) + (1,5\% \times Y) \\
 2.812.500 &= Y + 0,11Y + 0,015Y \\
 2.812.500 &= 1,125Y \\
 2.500.000 &= Y
 \end{aligned}$$

Tabel 13.2 Klasifikasi belanja dan beban pemerintah daerah

Permendagri nomor 21 tahun 2011 (Belanja)	PP nomor 71 tahun 2010 (Belanja)	PSAP nomor 12 paragraf 37-38 (Beban)
Belanja tidak langsung: a. Belanja pegawai b. Belanja bunga c. Belanja subsidi d. Belanja hibah e. Bantuan sosial f. Belanja bagi hasil g. Bantuan keuangan h. Belanja tak terduga	Belanja operasi: a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Bunga d. Subsidi e. Hibah f. Bantuan sosial	a. Beban pegawai b. Beban barang c. Beban bunga d. Beban subsidi e. Beban hibah f. Beban bantuan sosial
Belanja langsung: a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal	Belanja modal: a. Belanja tanah b. Belanja peralatan dan mesin c. Belanja gedung dan bangunan d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan e. Belanja aset tetap lainnya f. Belanja aset lainnya	g. Beban penyusutan aset tetap atau amortisasi
	Belanja tak terduga	h. Beban tak terduga
	Transfer	i. Beban transfer
	Transfer atau bagi hasil ke desa: a. Bagi hasil pajak b. Bagi hasil retribusi c. Bagi hasil pendapatan lainnya	

Kedua, unsur PPN dan PPh yang harus dipungut harus dicari nominalnya. Ketiga, jurnal yang dibuat berturut-turut untuk pembayaran pembelian kertas itu sendiri, pemungutan pajak atas pembelian kertas, dan pembayaran bendahara ke negara atas pemungutan pajak.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Jurnal saat pembayaran pembelian kertas			
Laporan operasional			
7 Mei 2022	Beban bahan habis pakai-ATK	Rp.2.812.500,-	
	Kas di bendahara pengeluaran		Rp.2.812.500,-
Laporan realisasi anggaran			
7 Mei 2022	Belanja bahan habis pakai-ATK	Rp.2.812.500,-	
	Estimasi perubahan SAL		Rp.2.812.500,-
Jurnal saat pajak dipungut di SKPD			
Laporan operasional			
7 Mei 2022	Kas di bendahara pengeluaran	Rp.312.500,-	
	Utang PPN (Rp.2.500.000,- x 11%)		Rp.275.000,-
	Utang PPh Pasal 22 (Rp.2.500.000,- x 1,5%)		Rp.37.500,-
Laporan realisasi anggaran			
7 Mei 2022	Tidak ada jurnal		
Jurnal saat pajak dibayarkan			
Laporan operasional			
7 Mei 2022	Utang PPN	Rp.275.000,-	
	Utang PPh Pasal 22	Rp.37.500,-	
	Kas di bendahara pengeluaran		Rp.312.500,-
Laporan realisasi anggaran			
7 Mei 2022	Tidak ada jurnal		

Beberapa transaksi tidak memerlukan pemungutan pajak, misalnya pada transaksi pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik. Contoh di atas untuk memberikan gambaran penuh tentang transaksi di pemerintah daerah beserta kewajiban memungut pajak. Nama akun untuk mengakui pengeluaran pada jurnal LO selalu memakai "Beban", sedangkan pada LRA memakai "Belanja". Prosedur pembayaran pada belanja pada SKPD dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) belanja uang persediaan (UP) atau pergantian uang (GU) atau tambahan uang (TU), (2) belanja langsung (LS) yang dikelompokkan menjadi belanja langsung gaji dan belanja langsung non gaji.

13.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daerah

Pembiayaan dicatat oleh PPKD. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto, yang penjelasannya ada pada Tabel 13.3. Pembiayaan diukur sesuai nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima oleh nilai sekarang kas

yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan dengan menggunakan mata uang rupiah. Pencatatan pembiayaan dilakukan pada LO dan LRA.

Tabel 13.3 Macam-macam pembiayaan pada pemerintah daerah

Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Neto
a. Penerimaan pinjaman b. Penjualan obligasi pemerintah c. Hasil privatisasi perusahaan negara/daerah d. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga e. Penjualan investasi permanen lainnya f. Pencairan dana cadangan	a. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga b. Penyertaan modal pemerintah c. Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu d. Pembentukan dana cadangan	Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan

Pada 11 Mei 2022, Pemerintah Kota M menerima pinjaman jangka panjang dari PD Bank Pasar Kota M sebesar Rp.500.000.000,-.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Laporan operasional			
11 Mei 2022	Kas di kas daerah	Rp.400.000.000,-	
	Kewajiban jangka panjang		Rp.400.000.000,-
Laporan realisasi anggaran			
11 Mei 2022	Estimasi perubahan SAL	Rp.400.000.000,-	
	Penerimaan pembiayaan-pinjaman		Rp.400.000.000,-

13.5 Akuntansi persediaan pada pemerintah daerah

Persediaan merupakan barang yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan proses produksi, barang dalam proses produksi dan barang untuk disimpan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Persediaan diakui saat ada potensi manfaat ekonomi masa depan yang dapat diukur secara andal, atau pada saat hak kepemilikan diterima. Persediaan dinilai sebesar biaya perolehan atau biaya standar produksi atau nilai wajar. Metode pencatatan diperbolehkan menggunakan perpetual dan periodik dengan FIFO. Beban persediaan dicatat untuk LO, sedangkan LRA hanya menampung pencatatan ketika ada pembelian.

Pada 1 Mei 2022, persediaan pupuk di Diperta Kota M adalah 10 karung @Rp.100.000,-. Pada tanggal 15 Mei 2022 dibeli 20 karung @Rp.120.000,-. Pada 20 Mei 2022, 15 karung disalurkan kepada petani.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Laporan operasional - Metode perpetual			
15 Mei 2022	Persediaan pupuk	Rp.2.400.000,-	
	Kas di bendahara pengeluaran (20 karung x Rp.120.000,-)		Rp.2.400.000,-
20 Mei 2022	Beban persediaan	Rp.1.600.000,-	
	Persediaan pupuk (10xRp.100.000,-) + (5xRp.120.000,-)		Rp.1.600.000,-
Laporan operasional - Metode fisik atau periodik			
15 Mei 2022	Persediaan pupuk	Rp.2.400.000,-	
	Kas di bendahara pengeluaran (20 karung x Rp.120.000,-)		Rp.2.400.000,-
20 Mei 2022	Tidak ada jurnal		
Laporan realisasi anggaran (baik perpetual maupun fisik)			
15 Mei 2022	Belanja persediaan	Rp.2.400.000,-	
	Estimasi perubahan SAL		Rp.2.400.000,-
20 Mei 2022	Tidak ada jurnal		

Cara perhitungan beban persediaan:

Metode perpetual	Jumlah nilai pada saat pemakaian	Rp.1.600.000,-
Metode fisik atau periodik	(nilai persediaan awal + nilai pembelian) - (jumlah persediaan akhir x harga beli terakhir)	= ((10xRp.100.000,-) + Rp.2.400.000,-) - ((10+20-15) x Rp.120.000,-) = Rp.1.600.000,-

13.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah

Sesuai PSAP nomor 6, metode pencatatan investasi tergantung dari prosentase kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki. Penjumlahan ada di PPKD. Investasi non permanen terdiri dari (1) pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, (2) investasi dalam obligasi atau surat utang negara (SUN), (3) proyek pembangunan, dan (4) penyertaan modal lainnya misalnya untuk upaya penyelamatan perekonomian. Investasi permanen terdiri dari: (1) penyertaan modal pemerintah daerah, dan (2) investasi permanen selain penyertaan modal.



Pada 19 Mei 2021, Pemerintah Kota M menginvestasikan dana di BUMD ABC sebesar Rp.35.000.000,- untuk kepemilikan 50%. Pada 31 Desember 2021, BUMD ABC mengumumkan laba sebesar Rp.10.000.000,- dan membagikan deviden sebesar Rp.6.000.000,-.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Laporan operasional - Metode ekuitas			
19 Mei 2021	Investasi- BUMD ABC	Rp.35.000.000,-	
	Kas di kas daerah		Rp.35.000.000,-
31 Des 2021	Investasi- BUMD ABC	Rp.5.000.000,-	
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO (50%xRp.10.000.000,-)		Rp.5.000.000,-
31 Des 2021	Kas di kas daerah	Rp.3.000.000,-	
	Investasi- BUMD ABC (50%xRp.6.000.000,-)		Rp.3.000.000,-
Laporan operasional - Metode biaya			
19 Mei 2021	Investasi- BUMD ABC	Rp.35.000.000,-	
	Kas di kas daerah		Rp.35.000.000,-
31 Des 2021	Piutang lainnya	Rp.5.000.000,-	
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO (50%xRp.10.000.000,-)		Rp.5.000.000,-
31 Des 2021	Kas di kas daerah	Rp.3.000.000,-	
	Piutang Lainnya (50%xRp.6.000.000,-)		Rp.3.000.000,-
Laporan realisasi anggaran (baik ekuitas maupun biaya)			
19 Mei 2021	Pengeluaran pembiayaan-investasi	Rp.35.000.000,-	
	Estimasi perubahan SAL		Rp.35.000.000,-
31 Des 2021	Tidak Ada Jurnal		
31 Des 2021	Estimasi perubahan SAL	Rp.3.000.000,-	
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA (50%xRp.6.000.000,-)		Rp.3.000.000,-

25 13.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah

Jenis **aset tetap** yang dapat diakui dan cara pengukurannya terdapat pada Tabel 4. Penjurnalan saat perolehan aset tetap dilakukan dua kali, pada LO dan LRA. Ilustrasi jurnal mirip dengan bagian beban dan belanja. Transaksi aset tetap yang terjadi umumnya mengenai penambahan dan pengurangan nilai aset.

Tabel 13.4 Jenis aset tetap dan biaya perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap dipakai.
Gedung dan bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, jaringan, dan instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap dipakai.
Aset tetap lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

2713.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah

1Dana cadangan dibuat untuk memenuhi keperluan dengan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan di jurnal pada saat pembentukan dana cadangan dan saat pencairan sebesar nilai nominalnya oleh PPKD. Kedua kejadian tersebut dicatat pada LO dan LRA karena melibatkan aliran keluar-masuk kas. Berikut contoh kasus dana cadangan.

18da 6 Januari 2022, Pemerintah Kota M membuat dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Laporan operasional			
6 Januari 2022	Dana cadangan	Rp.1.000.000.000,-	
	Kas di kas daerah		Rp.1.000.000.000,-
Laporan realisasi anggaran			
6 Januari 2022	Pengeluaran pembiayaan-pembentukan dana cadangan	Rp.1.000.000.000,-	
	Estimasi perubahan SAL		Rp.1.000.000.000,-

Pada 26 Mei 2022, dana cadangan Pemerintah Kota M dicairkan Rp.400.000.000,- untuk pembangunan pasar.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Laporan operasional			
26 Mei 2022	Kas di kas daerah	Rp.400.000.000,-	
	Dana cadangan		Rp.400.000.000,-
Laporan realisasi anggaran			
6 Januari 2022	Estimasi perubahan SAL	Rp.400.000.000,-	
	Penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan		Rp.400.000.000,-

Tabel 13.5 Klasifikasi dan cara mengukur aset lainnya pemerintah daerah

No	Klasifikasi	Pengukuran
1	Aset tak berwujud a. <i>Goodwill</i> b. Hak paten atau hak cipta c. Royalti d. Perangkat Lunak Komputer e. Lisensi f. Hasil kajian dengan manfaat jangka panjang g. Aset tidak berwujud lainnya h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan	Sebesar harga perolehan, baik dengan pembelian maupun perolehan internal.
2	Tagihan penjualan angsuran	Nilai nominal kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan dikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara atau daerah.
3	Tuntutan ganti rugi	Nilai nominal dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.
4	Kemitaan dengan pihak ketiga a. Bangun, kelola, serah (BKS) b. Bangun, serah, kelola (BSK) c. Kerja sama pemanfaatan (KSP) d. Sewa	Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
5	Kas yang dibatasi penggunaannya	Nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening untuk pembiayaan kegiatan yang membutuhkan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6	Aset lain-lain	Nilai tercatat saat aset tersebut dihentikan penggunaannya dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

13.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah

15 klasifikasi aset lainnya ada pada Tabel 13.5. Jurnal pengakuan adanya tagihan penjualan angsuran, ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan penghentian aset tetap hanya melibatkan LO, tanpa LRA karena tidak melibatkan aliran keluar-masuk kas. Sedangkan, jurnal perolehan aset tak berwujud secara tunai melibatkan LO dan LRA.

13.10 Akuntansi kewajiban pada pemerintah daerah

23 Kewajiban yang ada di pemerintah daerah sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013 dapat diklasifikasikan pada Tabel 6. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau terjadi transaksi, baik dengan atau tanpa pertukaran, yang berkaitan dan diakui oleh pemerintah. Pencatatan kewajiban terdiri saat timbulnya kewajiban dan pada saat pembayaran. Pencatatan pada saat timbul kewajiban tidak melibatkan LRA karena tidak berkaitan dengan kas keluar.

Tabel 13.6 Klasifikasi utang pemerintah daerah

Kewajiban Jangka Pendek		Kewajiban Jangka Panjang
PPKD	SKPD	PPKD
a. Utang bunga b. Bagian lancar utang jangka panjang c. Utang beban d. Utang jangka pendek lainnya	a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) b. Pendapatan diterima di muka c. Utang beban d. Utang jangka pendek lainnya	a. Utang dalam negeri b. Utang luar negeri c. Utang jangka panjang lainnya

Pada tanggal 15 Mei 2022, CV Indah digunakan jasanya untuk mendekor ulang ruang rapat pendopo Pemerintah Kota M sebesar Rp.20.000.000,-. Rencananya fee akan dibayar pada 25 Mei 2022.

Transaksi tersebut harus dicatat di SKPD karena berhubungan dengan beban barang dan jasa.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
Jurnal saat timbul kewajiban			
Laporan operasional			
15 Mei 2022	Beban renovasi	Rp.20.000.000,-	
	Kewajiban kepada pihak ketiga		Rp.20.000.000,-
Laporan realisasi anggaran			
15 Mei 2022	Tidak ada jurnal		
Jurnal saat pelunasan ke pihak ketiga			
Laporan operasional			
25 Mei 2022	Kewajiban kepada pihak ketiga	Rp.20.000.000,-	
	Kas bendahara pengeluaran		Rp.20.000.000,-
Laporan realisasi anggaran			
25 Mei 2022	Belanja renovasi	Rp.20.000.000,-	
	SILPA		Rp.20.000.000,-

13.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi

Menurut PSAP nomor 1, paragraf 14, komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari gabungan pelaporan keuangan dan anggaran. Luaran siklus akuntansi instansi pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Bentuk laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dapat dilihat pada lampiran Lampiran PP nomor 71 tahun 2010. Perbedaan anggaran dan realisasi pada LRA diungkapkan dan dijelaskan sebabnya pada CaLK. Konversi yang dilakukan karena perbedaan klasifikasi belanja juga harus diungkapkan pada CaLK. Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan disebut SiLPA (Sisa Lebih Pembayaran), sedangkan selisih kurang disebut SiKPA (Sisa Kurang Pembayaran).

DAFTAR PUSTAKA

Erlina, Rambe OS & Rasdianto (2020). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik (I). Andi, Yogyakarta.

GLOSARIUM

6

PPKD Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

20

SKPD Satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, staf-staf ahli, sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, inspektorat daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan kelurahan atau desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

DAFTAR ISI

13 Akuntansi Keuangan Sektor Publik	147
13.1 Pendahuluan	148
13.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah	149
13.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah	150
13.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daerah.....	152
13.5 Akuntansi persediaan pada pemerintah daerah	153
13.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah	154
13.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah	155
13.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah	156
13.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah	158
13.10 Akuntansi kewajiban pada pemerintah daerah	158
13.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi	159

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

DAFTAR TABEL

Tabel 13.1 Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah	149
Tabel 13.2 Klasifikasi belanja dan beban pemerintah daerah.....	151
Tabel 13.3 Macam-macam pembiayaan pada pemerintah daerah.....	153
Tabel 13.4 Jenis aset tetap dan biaya perolehan.....	156
Tabel 13.5 Klasifikasi dan cara mengukur aset lainnya pemerintah daerah.....	157
Tabel 13.6 Klasifikasi utang pemerintah daerah	158



Book Chapter AKL- revised

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

19 %
INTERNET SOURCES

11 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 id.scribd.com 2 %
Internet Source

2 laman.temanggungkab.go.id 2 %
Internet Source

3 mybloogadress.blogspot.com 2 %
Internet Source

4 www.coursehero.com 2 %
Internet Source

5 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1 %
Student Paper

6 123dok.com 1 %
Internet Source

7 peraturan.bpk.go.id 1 %
Internet Source

8 sosdukcakil.jambiprov.go.id 1 %
Internet Source

9 eprints.iain-surakarta.ac.id 1 %
Internet Source

10 www.esdm.go.id 1 %
Internet Source

11 docobook.com 1 %
Internet Source

12 materi.smkn43jkt.sch.id 1 %
Internet Source

repositori.usu.ac.id

13	Internet Source	1 %
14	www.subang.go.id Internet Source	1 %
15	es.scribd.com Internet Source	1 %
16	fathanpuluhulawa.blogspot.com Internet Source	1 %
17	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
18	pusaka.or.id Internet Source	<1 %
19	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
20	slideplayer.info Internet Source	<1 %
21	www.kuduskab.go.id Internet Source	<1 %
22	Dwi Joko Prabowo, Elfreda Aplonia Lau, dan Umi Kulsum. "ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TAHUN 2017", DEDIKASI, 2020 Publication	<1 %
23	Natalia Manopo, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere. "ANALISIS BELANJA DI UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN	<1 %

24

Dedy Kurniawan Kiay Demak, Jullie J. Sondakh, Steven Tangkuman. "PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 DALAM PELAPORAN AKUNTANSI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2015

Publication

<1 %

25

Deni Herdiyana, Muhammad Luqman Rokhim. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2021

Publication

<1 %

26

Intan Damarwati, Gunardi Gunardi. "Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022

Publication

<1 %

27

rohmadnyuliantoro.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %